

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN DAN
PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu dapat mendukung sebuah penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dikaji oleh peneliti, yaitu:

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Adelia Puteri Setiawan (2021), dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kota Layak Pemuda di Kota Palembang.”

Pemuda merupakan tulang punggung pembangunan di masa yang akan datang. Potensi pemuda Indonesia tersebar dari sabang sampai merauke perlu pengelolaan yang terintegrasi. Hal ini yang mendasari Pemerintah, melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), merancang program Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 tahun 2017. Kota Palembang merupakan salah satu kota besar yang terdapat di Sumatera yang masih dalam proses pengembangan, diharapkan dapat turut serta menjadi salah satu kota Layak Pemuda di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kelayakan Kota Palembang sebagai Kota Layak Pemuda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang

digunakan yaitu sumber data primer. Data primer diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data secara langsung pada sumber data, melalui survey lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, sumber daya merupakan faktor penting karena kekurangan sumber daya maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Isti Hidayah (2018), dengan penelitian yang berjudul “Kajian Kota Layak Pemuda Kota Semarang.”

Pemuda merupakan tulang punggung pembangunan di masa yang akan datang. Potensi pemuda di Indonesia yang tersebar dari Sabang dan Merauke perlu pengelolaan yang terintegrasi. Hal ini yang mendasari pemerintah, melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), mecanangkan program kabupaten/kota layak pemuda yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017. Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah yang masih dalam proses pengembangan, diharapkan dapat turut serta menjadi salah satu kota layak pemuda di Indonesia. Oleh karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kelayakan Kota Semarang sebagai kota layak pemuda. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method), yaitu mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan metode

pengumpulan data secara langsung pada sumber data, melalui survey lapangan dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau data dari suatu lembaga atau instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kepemudaan di Kota Semarang yang terdiri atas kegiatan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda telah dilaksanakan di Kota Semarang. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penyelenggaraan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga pendidikan dan pihak swasta yang menyasar para pemuda, siswa SMA, Mahasiswa dan Santri serta melibatkan berbagai instansi terkait dan didukung oleh pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, Yayasan, Swasta dan Swadaya Masyarakat. Dengan kondisi pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan sarana-prasarana kepemudaan, Kota Semarang dinilai cukup layak untuk menjadi salah satu Kota Layak Pemuda di Indonesia.

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Indah Restu Utami (2021), dengan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Pemuda Dalam Program Kota Layak Pemuda (KLP) di Kota Pekanbaru.”

Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, sebuah kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan salah satu tujuan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pekanbaru sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk besar di Indonesia, dengan sebagian besar penduduk berusia 15-29 tahun yang diklasifikasikan sebagai pemuda. Dengan jumlah

pemuda yang besar di Pekanbaru, pemuda Kota Pekanbaru memiliki minat tinggi dalam berpartisipasi dan membentuk organisasi pemuda dan telah berhasil menciptakan aplikasi peduli lingkungan yang membuat Kota Pekanbaru meraih penghargaan sebagai kota layak pemuda pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan pemuda dalam program kota layak pemuda (KLP) di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor pendukung pemberdayaan pemuda dalam program kota layak pemuda (KLP) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis berdasarkan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pemuda dalam program kota layak pemuda (KLP) di Kota Pekanbaru masih kurang optimal, disebabkan oleh beberapa indikator yang masih belum berjalan dengan baik, yaitu kemauan dan peran pemerintah yang baik.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Adelia Puteri Setiawan (2021)	Implementasi Kebijakan Kota Layak Pemuda di Kota Palembang	Edward III	Kualitatif	Metode pengumpulan data secara langsung pada sumber data	Survey lapangan dan wawancara
2.	Isti Hidayah (2018)	Kajian Kota Layak Pemuda Kota Semarang	Creswell	Kualitatif dan kuantitatif	Metode pengumpulan data secara langsung pada sumber data	Data sample, survey lapangan dan wawancara
3.	Indah Restu Utami (2021)	Pemberdayaan Pemuda Dalam Program Kota Layak Pemuda (KLP) di Kota Pekanbaru	Gender Analysis Pathway	Kualitatif dan fenomenologis	Metode pengumpulan data secara langsung pada sumber data	Wawancara, observasi, dan dokumentasi

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Keunggulan peneliti dari kajian peneliti sebelumnya yaitu bisa terlihat dari fokus peneliti kepada implementasi kebijakan, dalam hal ini, memiliki fokus yang jelas pada implementasi kebijakan Kota Layak Pemuda di DISPORA Kota Bandung. Ini membuat penelitian tersebut lebih spesifik dan terarah pada aspek tertentu yang perlu dievaluasi. Terutama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk pemahaman mendalam mengenai permasalahan dan situasi yang dihadapi serta cara-cara untuk mengatasinya. Pengambilan data yang lengkap dari berbagai cara pengambilan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dokumen-dokumen yang relevan. Kombinasi pengambilan data ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi yang ada.

Referensi teori yang relevan menggunakan teori Ripley dan Franklin (2007) tentang implementasi kebijakan sebagai perbandingan dalam implementasi kebijakan. Ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut berusaha mendekati implementasi dengan dasar teori yang terukur. Hal ini menekankan kolaborasi dengan konsep pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai landasan penting dalam menjalankan program kota layak pemuda.

Hal ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan pemuda. Secara keseluruhan ini membuat lebih terperinci, spesifik, dan fokus pada implementasi kebijakan Kota Layak Pemuda serta pengaruhnya terhadap para pemuda. Ketiga penelitian tersebut menjadi acuan peneliti dan juga perbandingan dalam menemukan sebuah inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Kajian terhadap penelitian terdahulu membantu mempertegas posisi penelitian dan orisinalitas dari penelitian. Judul yang diambil peneliti memiliki persamaan dengan judul dari penelitian terdahulu yang dikaji peneliti, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi.

2.1.1 Kajian Administrasi Publik

Pengertian administrasi publik yaitu suatu kebijakan organisasi maupun pemerintah untuk dikelola dengan baik dalam mencapai tujuan sebuah negara secara efektif dan efisien. Pada intinya memberikan pelayanan kepada publik untuk mengatur organisasi sehingga berjalan dengan baik. administrasi publik ini mencakup sebuah lembaga diantaranya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif mengenai suatu kebijakan publik.

Administrasi publik merupakan proses yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga yang bekerja sama dalam melaksanakan tugas pemerintahan dengan memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif (Pasolong, 2017:9).

Henry (1998) yang dikutip Pasolong dalam buukunya Teori Administrasi Publik (2017:9) berpendapat bahwa:

“Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek. Dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.”

Arifin Abdulrachman (1959:2) dalam buku Majalah Administrasi Negara mengatakan bahwa dalam administrasi publik merupakan ilmu-ilmu yang telah mempelajari adanya pelaksanaan dari politik sebuah negara.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan suatu ilmu yang telah mempelajari berbagai keputusan atau kekuasaan atas lembaga-lembaga dan badan-badan politik sebuah negara.

Dwilight Waldo (1955) dalam buku *The Study Of Public Administration* menjelaskan sebagai berikut:

“Administrasi Publik merupakan sebuah organisasi serta manajemen di peruntukan dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan yang telah tercapai untuk pemerintah.”

Definisi diatas bahwa administrasi publik menjelaskan berbagai manajemen dan organisasi dilihat dari adanya ruang lingkup serta tugas yang hendak dijalankan, sifat tujuan yang hendak dicapai dan dikembangkan, serta sarana dan prasarana terhadap jumlah orang yang terlibat.

Menurut Pfiffner dan Presthus yang dikutip oleh Pamudji (1985) mengemukakan administrasi negara atau administrasi publik dengan pengertian sebagai berikut:

“Administrasi Negara merupakan proses implementasi kebijakan Pemerintah yang telah direncanakan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi Negara dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan kelompok individu melalui koordinasi untuk melakukan tugas pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah.”

Felix A, Nigro yang dikutip oleh Pamudji (1985, p. 22) menyatakan pendapat lain mengenai Administrasi Negara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Administrasi Negara merupakan suatu kerja sama yang dilakukan secara berkelompok dalam lingkungan pemerintahan.
- 2) Mencakup ketiga lembaga dalam pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta keterkaitan antara lembaga tersebut.
- 3) Menjadi bagian dari proses politik karena memiliki peranan penting dalam perumusan suatu kebijakan negara atau umum.
- 4) Memiliki perbedaan dengan administrasi privat dalam beberapa hal.
- 5) Memiliki kaitan yang sangat erat dengan berbagai macam kelompok individu dan/atau swasta dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat kesimpulan bahwa administrasi publik ini merupakan suatu proses kegiatan terhadap suatu lembaga atau badan politik yang dilakukan oleh aparatur negara untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif. Urgensi mengenai administrasi publik dengan dua orang atau lebih dalam menjalankan kekuasaan negara mengenai sebuah perjanjian dari jumlah orang yang terlibat.

2.1.2 Kajian Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang actor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada

dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7):

“Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang di usulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Definisi kebijakan publik yang merupakan sebuah aturan yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis serta bagian dari keputusan-keputusan politik untuk mengatasi berbagai permasalahan dan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat.

Woll (2003:2) mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah aktifitas pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melewati lembaga-lembaga yang mempengaruhi adanya kehidupan bermasyarakat.

Pengertian kebijakan publik menurut Easton (1969) yaitu pemberian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keradaanya mengikat dan memaksa guna memecahkan permasalahan publik. Kebijakan publik dapat dilihat

dari beberapa tindakan yaitu kebijakan manajerial, kebijakan umum dan kebijakan teknik operasional dimana proses kebijakan publik ini dapat dilihat sebuah prosesnya meliputi:

1. Pembuatan atau penyusunan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Kesimpulannya adalah yaitu bahwa kebijakan publik adalah tindakan pemerintah, apabila pemerintah melakukan sesuatu maka ada tujuan yang hendak dicapai. Sebaliknya. Apabila pemerintah tidak melakukan sesuatu maka kebijakan publik dilakukan atas tujuan yang telah dicapai sebelumnya.

Untuk melakukan studi kebijakan publik atau studi yang bertujuan menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara jelas berbagai sebab dan akibat dari perilaku pemerintah.

Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab sebagai berikut:

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a) Alasan ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan tujuan agar mendapatkan pengetahuan yang luas tentang asal-muasal, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya sebagai masyarakat. Dalam hal berikut kebijakan dapat dilihat sebagai “variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, jadi perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau yang mempengaruhi isi kebijakan publik”. Kebijakan dikatakan sebagai “variabel independen” apabila fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan yang tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b) Alasan professional

Studi kebijakan publik dipandang sebagai cara untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan politik

Alasan mempelajari kebijakan publik ditujukan supaya pemerintah bisa mewujudkan kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat.

2.1.3 Kajian Implementasi Kebijakan

Menurut Ripley dan Franklin di dalam buku Budi Winarno (2007:145), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti persyaratan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud membuat program berjalan. Sedangkan menurut Ripley dan Franklin dalam Sujianto (2008:46) mengemukakan ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:

- a) Kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat konsensus diantara pelaksanaan atas tujuan-tujuan.
- b) Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program.
- c) Tipe-tipe orang memperoleh manfaat dan klien terbatas, yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi.

Implementasi kebijakan bukan hanya sebagai pengimplementasian sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan juga tidak sekadar berhubungan dengan cara mengimplementasikan keputusan politik kepada langkah rutin dalam birokrasi, tetapi juga berhubungan dengan permasalahan keputusan, konflik, dan yang akan mendapatkan manfaat dari sebuah kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2006:65) mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok lembaga pemerintahan atau swasta yang diarahkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Sehingga dapat dimaknai bahwa suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Kebijakan yang hanya digagas tanpa dilaksanakan hanya akan menjadi arsip-arsip yang tidak berguna.”

Hakikat dari implementasi kebijakan yakni memahami apa yang harusnya terjadi setelah suatu kebijakan atau program tersebut dirumuskan. Hal ini meliputi upaya administrasi dan menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.

Widodo (Pratama, 2013:230), menyampaikan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dari adanya proses kebijakan publik studi yang sangat krusial. Lester dan Stewart (Nastia, 2014:201) mengatakan bahwa “implementasi suatu proses dari adanya sebuah hasil (output) yang didapat diukur dan dilihat atas keberhasilan implementasi kebijakan demi tercapainya tujuan hasil akhir atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih dalam kebijakan.

Dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu tahapan dari proses kebijakan publik untuk membuat keputusan yang akan diraih berdasarkan tujuan yang bersifat krusial. Dimana sebuah kebijakan jika tidak direncanakan dengan baik dalam melakukan implementasinya, maka tujuannya pun tidak akan bisa terwujud begitupun sebaliknya.

Implementasi kebijakan publik ini memiliki dua tipe model, yaitu yang pertama adalah implementasi kebijakan dari atas ke bawah atau disebut dengan istilah *Top-down* ataupun implementasi kebijakan yang memiliki pola dari bawah ke atas atau disebut dengan istilah *bottom-up*, lalu yang kedua adalah

implementasi kebijakan yang berpola memaksa atau yang disebut dengan istilah *command and control* ataupun yang berpola pasar yang biasa disebut dengan istilah *economic incentive*.

Udoji dalam Agustino menyatakan bahwa:

“Pendekatan model *“top-down”* merupakan pendekatan implementasi kebijakan publik yang dilakukan secara tersentralisasi atau diawali dari actor dari tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.”

Menurut Smith dan Larmier Solichin Abdul Wahab (2014:141) implementasi kebijakan dapat pula dianggap sebagai suatu proses, keluaran (output) dan hasil akhir (outcome). Maka implementasi kebijakan dapat dikonsepsikan sebagai suatu proses serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan penting dalam studi implementasi.

2.1.4 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan *top-down* beranggapan bahwasannya keputusan politik yang sudah dibuat oleh para *stakeholders* harus diimplementasikan oleh birokrat atau administrator pada tingkat yang lebih rendah. Sedangkan model *bottom-up*, mengacu kepada kebijakan yang walaupun ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pada implementasinya dilakukan oleh masyarakat. Kedua model ini sama-sama mempertimbangkan sejauh mana kesesuaian aksi para pelaksana dengan tujuan dan langkah para *stakeholders*.

a. Model George C. Edward II

Model Implementasi kebijakan yang dirancang oleh George C. Edward III adalah salah satunya model implementasi yang bersifat *top-down*. Terdapat 4 faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi model implementasi kebijakan ini, yaitu diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang model implementasi Edward III:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur birokrasi

b. Model Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (Tahir, 2014:71-72) merumuskan adanya sebuah hubungan yang menunjukkan berbagai variabel untuk mempengaruhi sebuah kinerja suatu kebijakan, enam variabel yang mempengaruhi kinerja suatu implementasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- 4) Karakteristik agen pelaksanaan
- 5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
- 6) Sikap para pelaksana

c. Model Warwic

Menurut Warwic (Tahir, 2014:93) dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan, keempat variabel

implementasi kebijakan yang berhasil dapat faktor yang perlu dipengaruhi yakni:

- 1) Kemampuan organisasi
- 2) Informasi
- 3) Dukungan
- 4) Pembagian potensi

d. Model Charles O. Jones

Jones (Tahir, 2014:81) menerangkan bahwa implementasi kebijakan merupakan dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dan kegiatan dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Tiga aktivitas yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- 1) Organisasi
- 2) Interpretasi
- 3) Aplikasi

e. Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Weimer dan Vining (Tahir, 2014:76) mengemukakan tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- 1) Logika kebijakan
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioprasionalkan
- 3) Kemampuan implementor kebijakan

f. Model Ripley dan Franklin

Ripley dan Franklin dalam (Winarmo, 2014:148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor,

khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Menurut Ripley dan Franklin ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku
- 2) Adanya kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah
- 3) Pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki terarah

Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya setelah semua berjalan maka akan terwujud kinerja yang baik dan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan model konseptual bagaimana teori dapat berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang sangat penting menurut Uma Sekaran (Sugiyono, 2017:60). Kerangka berpikir ini sebagai teori yang digunakan sesuai dengan landasan dalam pola pemikiran untuk memecahkan suatu masalah penelitian. Menurut penulis indikator yang ada pada kerangka berpikir ini berhubungan satu sama lain terhadap permasalahan, yaitu implementasi kebijakan tentang pengembangan kota

layak pemuda di Dispora Kota Bandung. Maka berdasarkan definisi diatas peneliti menggunakan teori Ripley dan Franklin (2007:145) yang mengidentifikasi tiga faktor yang mendukung implementasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan
- 2) Lancarnya rutinitas fungsi
- 3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Deskripsi mengenai kerangka berpikir diatas yaitu guna mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tentang pengembangan kota layak pemuda yang secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan sedang meningkatkan kebutuhan para pemudanya, dapat diukur dengan menggunakan teori dari Ripley dan Franklin yang terdapat faktor yang mendukung implementasi kebijakan seperti kepatuhan aturan, lancarnya rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Untuk mencapai tujuannya sebagai optimalisasi pada pengembangan kota layak pemuda di Dispora Kota Bandung. Sehingga dapat tercapainya optimalisasi terhadap suatu kebijakan tersebut.

Alasan memilih model implementasi kebijakan Ripley dan Franklin ini adalah peneliti menganggap model ini lebih tepat digunakan dalam menilai pelaksanaan kebijakan di lingkungan birokrasi karrena dimensinya lebih menyentuh prinsip dasar pembuatan kebijakan itu sendiri yaitu menuntut adanya kepatuhan birokrat atau aparatur terhadap kebijakan dan tercapainya tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Ripley dan Franklin mengatakan bahwa:

“Untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan maka dapat dilihat dengan tiga dimensi yaitu: 1) kepatuhan (compliance), 2) lancarnya rutinitas fungsi (smoothly functioning routines) dan 3) terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (desired performance in and impacts)”.

Untuk lebih terangnya dapat dijelaskan ketiga dimensi Ripley dan Franklin tersebut sebagai berikut:

a. Kepatuhan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan bisa diukur dari tingkat kepatuhan terhadap aturan-aturan atau pedoman-pedoman umum yang didukung oleh kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan, kepatuhan pada isi kebijakan merupakan bagian penting dan harus dimiliki oleh seluruh aparat atau birokrat yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan adanya kepatuhan terhadap isi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan tersebut telah merujuk kepada teori atau isi dari kebijakan yang sebenarnya. Maksudnya kebijakan tersebut telah diimplementasikan sebagaimana semestinya. Dengan cara inilah tujuan dari kebijakan mungkin bisa dicapai dengan cara efektif dan efisien.

b. Lancarnya Rutinitas Fungsi

Implementasi kebijakan yang sukses ditandai dengan lancarnya suatu aktivitas rutin fungsi serta tidak terdapat permasalahan yang dialami. Aktivitas rutin fungsi merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Kesuksesan ataupun kegagalan sebuah implementasi kebijakan tergantung kepada dampak serta kinerja ataupun

kegunaan yang diinginkan oleh kebijakan tersebut. Menurut Ripley dan Franklin terdapat dua bagian dari keberhasilan implementasi. Yakni, terwujudnya kinerja kebijakan yang lebih merujuk kepada pencapaian hasil implementasi dalam jangka waktu yang sedikit, sedangkan terwujudnya dampak kebijakan merujuk pada pencapaian hasil pelaksanaan dalam jangka waktu yang lebih panjang,



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

2.3 Proposisi

Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah peneliti kemukakan diatas, maka peneliti akan merumuskan proposisi yang merupakan dugaan sementara dari

sebuah penelitian dari fenomena yang terjadi. Dengan begitu peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan tentang pengembangan kota layak pemuda di Dispora Kota Bandung bisa dapat berjalan sesuai dengan optimal jika mengacu kepada dimensi implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan.

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan program pengembangan kota layak pemuda di Dispora Kota Bandung sudah berjalan dengan baik dan sedang meningkatkan kebutuhan para pemudanya.
2. Terdapat faktor pendorong yang menjadikan implementasi kebijakan tentang pengembangan kota layak pemuda di Dispora Kota Bandung.